

Kemenangan Keluarga Bangsawan pada Pilkada Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada Tahun 2018

Inrinofita Sari^{1*}, Mohamad Adrian Maulana²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

*E-mail: dosen03013@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keluarga bangsawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bone tahun 2018. Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi demokrasi dan menerapkan sistem pemilu langsung, struktur sosial tradisional berbasis kebangsawanan tetap memainkan peran signifikan dalam proses politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data qualitative data analysis (QDA) dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari sumber media online, website, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kemenangan Keluarga Bangsawan. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus, dengan fitur Crosstab Query untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel dan Word Cloud untuk mengidentifikasi kata-kata dominan dalam data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bone masih sangat mempertimbangkan status keturunan bangsawan dalam memilih pemimpin daerah. Keluarga bangsawan tidak hanya berfungsi sebagai simbol tradisi dan pelindung budaya, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif dalam mobilisasi massa, komunikasi politik, dan pembentukan legitimasi. Fenomena ini mencerminkan bahwa simbolisme budaya dan hierarki sosial tradisional masih sangat berpengaruh dalam membentuk arah politik dan pemerintahan lokal di Kabupaten Bone, meskipun berlangsung dalam kerangka demokrasi modern.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, keluarga bangsawan, Demokrasi lokal

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of noble families in the 2018 Bone Regency Regional Head Election (Pilkada). Although Indonesia has undergone democratic reforms and implemented a direct election system, traditional nobility-based social structures still play a significant role in the local political process. This research uses qualitative methods, including qualitative data analysis (QDA) and a descriptive approach. Data was obtained from online media sources, websites, and previous research on the Victory of the Noble Family. Data processing was done using Nvivo 12 Plus software, with the Crosstab Query feature to visualize relationships between variables and Word Cloud to identify dominant words in the data. The results show that the people of Bone Regency still strongly consider the status of noble descendants when choosing regional leaders. Noble families function as symbols of tradition and cultural protectors and as political actors active in mass mobilization, political communication, and legitimacy building. This phenomenon reflects that cultural symbolism and traditional social hierarchies are still very influential in shaping the direction of politics and local governance in Bone Regency despite taking place within the framework of modern democracy.

Keywords : Regional head elections, noble families, local democracy

PENDAHULUAN

Demokrasi yang pada hakikatnya adalah kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Rohim *et al.*, 2023). Sebagai pemegang kedaulatan, partisipasi rakyat seharusnya tidak terhenti hanya didalam bilik suara. Lebih dari itu, dalam setiap tahapan kehidupan bernegara dalam skala apa pun, rakyat memiliki hak dan juga kewajiban untuk berpartisipasi (Prianto *et al.*, 2025). Demokrasi juga diartikan sebagai kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi pemimpin di suatu negara bahkan ditingkat Desa sekalipun (Wakhid, Qohar and Faizal, 2021). Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam kontekspolitik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik (Zarkasi and Rizal, 2020). Partisipasi politik dalam konteks ini lebih dari sekadar memilih pemimpin melalui pemilu, melainkan mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemerintahan, baik itu dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan tersebut (Swandari, Lukman and Wirantari, 2025).

Dalam prakteknya, dinamika politik lokal di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang kuat, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah (Pilkada) (Aidil, 2024). Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, peran keluarga bangsawan atau elit tradisional dalam kontestasi politik sangat berarti. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal, yang melibatkan aspek hierarki sosial dan kekuatan warisan darah keturunan bangsawan, terus memengaruhi proses politik meskipun Indonesia telah mengalami reformasi demokrasi yang memberikan hak suara yang sama kepada seluruh rakyat (Ruru Aris Setyawibawa, 2025).

Dalam Pilkada di Kabupaten Bone pada tahun 2018, kemenangan keluarga bangsawan menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis. Kabupaten Bone dikenal dengan tradisi kebangsawanannya yang sangat kental, di mana kelompok bangsawan, yang memiliki garis keturunan raja-raja Bone, masih memegang peranan penting dalam pemerintahan lokal (Zharfandy, 2016). Fenomena ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai kebangsawanannya dan status sosial yang terkait dengan darah keturunan bangsawan masih sangat berpengaruh dalam keputusan politik masyarakat (Rismawidiawati, 2017).

Sejak dilaksanakannya Pilkada langsung pada tahun 2005, kelompok bangsawan di daerah-daerah seperti Kabupaten Bone, Wajo, Luwu, dan Soppeng, menjadi salah satu kelompok dominan yang sering muncul sebagai calon bupati atau wakil bupati (Zharfandy, 2016). Dalam praktiknya, partai politik di Kabupaten Bone lebih memilih untuk mengusung calon dari kalangan bangsawan, karena dianggap lebih mudah menarik dukungan rakyat, yang melihat keluarga bangsawan sebagai simbol otoritas dan kehormatan. Kemenangan keluarga bangsawan dalam Pilkada 2018 menunjukkan bahwa masyarakat Bone, meskipun sudah berada dalam sistem demokrasi, tetap mempertahankan pandangan tradisional terhadap pemimpin yang berasal dari keturunan bangsawan. Keterlibatan mereka dalam

Pilkada sering kali dianggap sebagai langkah aman bagi partai politik untuk memperoleh suara, mengingat tingginya tingkat loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon dari kalangan bangsawan (Haboddin, 2016).

Keluarga bangsawan yang turun ke arena politik tidak hanya didorong oleh partai politik, tetapi juga oleh aspirasi pribadi dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka sebagai pemimpin yang sah, dengan legitimasi dari darah keturunan raja (Rismawidiawati, 2017) Seiring dengan perubahan zaman dan era reformasi, wacana politik di Kabupaten Bone berkembang dengan munculnya calon-calon dari kalangan non-bangsawan. Namun, meskipun ada upaya untuk mengantikan dominasi bangsawan dalam pemerintahan lokal, faktanya, masyarakat Bone cenderung tetap mempertahankan pilihan mereka pada calon-calon yang berasal dari keluarga bangsawan, yang dianggap memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh-tokoh bersejarah yang pernah memimpin daerah tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjadi pemimpin, nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan kebangsawanan dan warisan budaya tetap berpengaruh besar dalam proses politik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana kemenangan keluarga bangsawan dalam Pilkada Kabupaten Bone 2018 mencerminkan interaksi antara tradisi lokal dan dinamika demokrasi modern, serta dampaknya terhadap arah kebijakan dan keberlanjutan sistem politik lokal di Kabupaten Bone. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keluarga bangsawan dalam Pilkada Kabupaten Bone 2018.

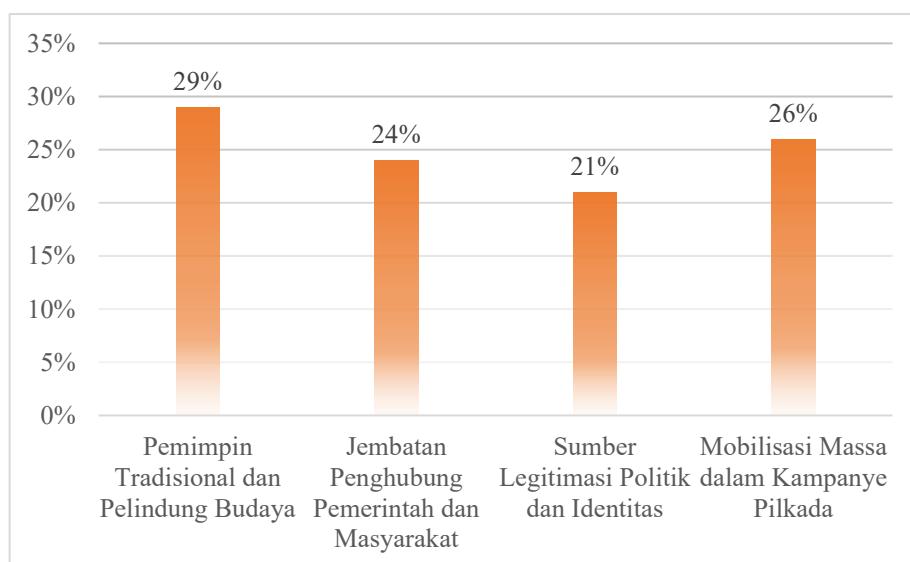
METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis data qualitative data analysis (QDA) dengan pendekatan deskriptif (Sari and Suswanta, 2023). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan merekonstruksi realitas sosial yang kompleks melalui analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data penelitian ini antara lain Media Online, Website dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kemenangan Keluarga Bangsawan pada Pilkada Kabupaten Bone. Dalam analisis data, penulis menggunakan Nvivo 12 Plus dengan fitur Crosstab Query untuk melihat persentase data yang telah dikoding dan memvisualisasikan hubungan antar variabel. Penulis juga menggunakan Word Cloud untuk mengidentifikasi kata-kata atau konsep yang sering muncul dalam data, memberikan gambaran tentang tema-tema dominan dalam penelitian. Proses analisis dimulai dengan mengimpor data ke dalam Nvivo 12 Plus, kemudian melakukan koding untuk mengidentifikasi tema utama. Setelah itu, data dianalisis menggunakan fitur Crosstab Query, Word Cloud, dan analisis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada Kabupaten Bone pada tahun 2018 menampilkan fenomena menarik terkait peran keluarga bangsawan yang sangat memengaruhi pilihan politik masyarakat dan kebijakan lokal. Meskipun Indonesia telah mengalami reformasi demokrasi yang memberikan hak suara setara kepada seluruh rakyat, faktor sosial dan budaya lokal, terutama yang berkaitan dengan status kebangsawanan, tetap sangat dominan dalam proses politik di daerah tersebut, khususnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Pilkada 2018 menjadi contoh yang jelas bagaimana keluarga bangsawan di Kabupaten Bone memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil pemilihan. Masyarakat lebih cenderung memilih calon yang berasal dari kalangan bangsawan karena faktor historis, identitas budaya, dan legitimasi politik yang mereka bawa. Meskipun demokrasi memberi ruang bagi siapa saja untuk berkompetisi, nilai-nilai budaya dan hierarki sosial yang telah lama ada dalam masyarakat tetap berperan kuat. Hasil yang diperoleh pada Pilkada 2018 menunjukkan bahwa keluarga bangsawan tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya dan tradisi, tetapi juga memegang kendali dalam pengambilan keputusan politik dan sosial di daerah tersebut. Keberhasilan keluarga bangsawan dalam memenangkan Pilkada tersebut mencerminkan bagaimana masyarakat Kabupaten Bone masih mempercayakan kepemimpinan kepada mereka yang dianggap sah berdasarkan garis keturunan, meskipun ada upaya untuk menggantikan dominasi ini dengan calon-calon non-bangsawan.



Gambar 1: Peran Keluarga Bangsawan dalam Pilkada Kabupaten Bone

Gambar 1 menunjukkan bahwa peran keluarga bangsawan sebagai *Pemimpin Tradisional dan Pelindung Budaya* menempati posisi tertinggi dengan persentase sebesar 29%. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Bone

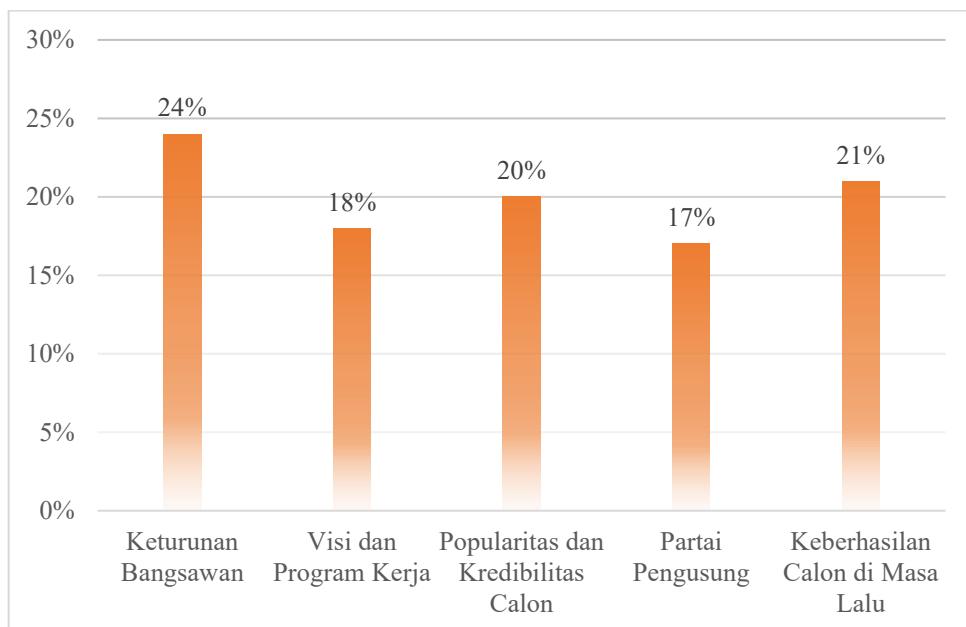
masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi lokal yang diwariskan melalui garis keturunan bangsawan. Dalam konteks Pilkada, kehadiran keluarga bangsawan bukan hanya simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan normatif yang memengaruhi legitimasi kandidat. Masyarakat cenderung melihat keluarga bangsawan sebagai penjaga kearifan lokal, sehingga keikutsertaan mereka dalam politik dianggap sebagai kelanjutan dari kepemimpinan tradisional yang telah terbukti mengakar dalam sejarah sosial Kabupaten Bone.

Selanjutnya, peran keluarga bangsawan dalam *Mobilisasi Massa dalam Kampanye Pilkada* mencatat persentase sebesar 26%, yang menunjukkan bahwa selain berfungsi sebagai simbol budaya, keluarga bangsawan juga memiliki kekuatan sosial yang nyata dan strategis dalam menggerakkan dukungan politik. Kekuatan ini tidak lepas dari keberadaan jejaring kekerabatan yang luas, ritual adat yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat, serta penggunaan simbol dan gelar kebangsawan yang masih memiliki daya resonansi tinggi di tengah komunitas lokal. Pengaruh tersebut menjadikan keluarga bangsawan sebagai aktor penting dalam membentuk dinamika kampanye politik yang berbasis pada pendekatan budaya. Peran ini mempertegas bahwa kekuasaan tradisional masih memiliki daya tarik elektoral yang signifikan, di mana loyalitas masyarakat dibentuk tidak semata-mata oleh program rasional para calon, melainkan juga oleh ikatan emosional, genealogis, dan kultural yang sudah terbangun lama. Maka, dalam konteks Pilkada, mobilisasi massa oleh keluarga bangsawan bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga sarat makna simbolik yang memperkuat legitimasi kandidat di mata masyarakat.

Kemudian, peran keluarga bangsawan sebagai *Jembatan Penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat* memperoleh persentase sebesar 24%, yang mengindikasikan adanya pengakuan masyarakat terhadap fungsi mediasi sosial-politik yang dijalankan oleh elite tradisional ini. Keluarga bangsawan dipercaya memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi dua arah: di satu sisi mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah, dan di sisi lain menyosialisasikan kebijakan publik dengan pendekatan budaya yang lebih akrab dan dapat diterima oleh masyarakat lokal. Fungsi mediatif ini juga menjadi bukti bahwa dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Bone, tata kelola pemerintahan tidak hanya berjalan melalui birokrasi modern semata, melainkan juga melalui struktur sosial tradisional yang memiliki legitimasi kuat dan akar historis yang dalam.

Selanjutnya, peran keluarga bangsawan sebagai *Sumber Legitimasi Politik dan Identitas* tercatat dengan persentase sebesar 21%. Status kebangsawan dalam hal ini dipandang sebagai modal simbolik yang memperkuat posisi politik seseorang, terutama dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik. Gelar bangsawan, sejarah keluarga, serta pengakuan adat yang melekat pada figur-figur tersebut menjadikan mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat sebagai calon pemimpin. Identitas sosial yang kuat dan persepsi akan kontinuitas kepemimpinan dari leluhur mereka memberi keuntungan elektoral yang tidak dimiliki oleh

kandidat dari latar belakang biasa. Dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bone, aspek kultural tidak hanya menjadi elemen pendukung, melainkan justru menjadi salah satu determinan utama dalam pembentukan preferensi politik masyarakat.



Gambar 2. Pengaruh Kebangsawan dalam Pilihan Masyarakat

Berdasarkan gambar 2 diatas menunjukkan bahwa faktor *keturunan bangsawan* menempati posisi paling dominan dalam memengaruhi pilihan masyarakat di Kabupaten Bone dalam ajang Pilkada, dengan persentase sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang kebangsawan masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon kepala daerah. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat seperti di Kabupaten Bone, status bangsawan bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga dianggap sebagai legitimasi historis dan moral untuk memimpin. Keturunan bangsawan dianggap lebih memahami nilai budaya lokal, memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, serta diyakini mampu menjaga keberlanjutan tradisi kepemimpinan yang telah ada sebelumnya. Maka tidak mengherankan jika faktor ini menjadi yang paling dominan karena melekat pada aspek identitas kolektif masyarakat Bone.

Selanjutnya *keberhasilan calon di masa lalu* dengan presentasi 21%, Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan prestasi konkret dari calon sebelumnya menjadi landasan pertimbangan rasional masyarakat. Pemilih cenderung percaya bahwa calon yang telah terbukti mampu menjalankan amanah sebelumnya, baik sebagai kepala daerah maupun dalam posisi publik lainnya, memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk memimpin kembali. Keberhasilan masa lalu sering kali dikaitkan dengan kemampuan manajerial, keberpihakan kepada rakyat, serta kredibilitas dalam memenuhi janji kampanye. Kemudian *popularitas dan*

kredibilitas calon dengan presentase 20% menjelaskan bahwa Popularitas mencerminkan sejauh mana seorang calon dikenal luas dan diterima secara sosial, sementara kredibilitas berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pribadi dan profesionalisme calon tersebut. Kombinasi keduanya menjadi modal sosial yang penting, terlebih dalam konteks kampanye yang mengandalkan komunikasi interpersonal dan penyebaran informasi melalui media sosial maupun tatap muka langsung.

Selanjutnya *visi dan program kerja* dengan persentase 18%, menandakan bahwa meskipun penting secara substansi, aspek ini belum menjadi prioritas utama dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi program, atau karena belum ada diferensiasi yang jelas antar calon terkait kebijakan yang ditawarkan. Banyak pemilih yang masih menilai calon berdasarkan siapa mereka, bukan semata apa yang mereka janjikan. Selanjutnya *partai pengusung* dengan presentase 17%, yang menegaskan bahwa kekuatan institusi partai politik belum terlalu berpengaruh dalam memengaruhi pilihan publik di tingkat lokal. Masyarakat cenderung tidak melihat afiliasi partai sebagai faktor utama dalam menentukan kualitas atau kelayakan seorang calon. Fenomena ini menunjukkan bahwa loyalitas terhadap partai masih lemah dan belum tertanam kuat dalam kesadaran politik masyarakat, terutama di wilayah yang hubungan sosial-komunalnya lebih dominan daripada struktur formal kepartaian. Calon kepala daerah dipilih bukan karena mereka diusung oleh partai tertentu, melainkan karena kepribadian, ketokohan, dan keterkaitannya dengan identitas lokal atau nilai-nilai budaya masyarakat.



Gambar 3. Topik Paling Banyak di Bicarakan terkait Kemenangan Keluarga Bangsawan pada Pilkada Kabupaten Bone

Berdasarkan Gambar 3 di atas, terlihat hasil analisis *word cloud* yang menampilkan kata-kata populer yang paling sering muncul dalam pembahasan

mengenai kemenangan keluarga bangsawan dalam Pilkada Kabupaten Bone. Analisis ini dibatasi pada 50 kata dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Dari hasil visualisasi tersebut, tampak bahwa kata “bangsawan” dan “keluarga” menjadi dua kata yang paling dominan, Hal ini mengindikasikan bahwa perbincangan publik sangat terpusat pada dimensi status sosial dan relasi genealogis dari kandidat pemenang yang berasal dari lingkungan keluarga bangsawan. Ini juga menunjukkan bahwa identitas kebangsawan tetap menjadi unsur sentral dalam konstruksi narasi politik lokal, serta masih dipandang sebagai sumber legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Selain itu, munculnya kata-kata seperti “Kabupaten, Bone, Pilkada dan Budaya” menunjukkan bahwa perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada figur elite tradisional secara personal, tetapi juga pada konteks struktural dan kultural yang melingkupi proses politik tersebut. Kemenangan keluarga bangsawan tidak semata-mata dipahami sebagai prestasi elektoral, melainkan sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang berakar pada tradisi, struktur sosial lokal, dan dinamika demokrasi berbasis nilai-nilai budaya. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Bone, simbolisme budaya seperti kebangsawan tidak hanya berfungsi sebagai atribut identitas, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memiliki pengaruh nyata dalam membentuk persepsi publik, membangun legitimasi kandidat, dan mengarahkan preferensi elektoral masyarakat secara kolektif.

KESIMPULAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bone tahun 2018 menunjukkan bahwa status kebangsawan masih menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Meskipun pemilu berlangsung dalam kerangka demokrasi modern yang secara normatif menjamin kesetaraan hak pilih dan kompetisi yang terbuka, preferensi politik masyarakat Bone tetap sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang telah mengakar kuat. Masyarakat cenderung memilih calon dari keluarga bangsawan karena status tersebut dianggap membawa legitimasi budaya, historis, dan sosial yang tidak dimiliki oleh calon dari luar kalangan tersebut. Peran keluarga bangsawan dalam Pilkada tidak hanya terlihat sebagai pewaris nilai dan simbol tradisi, tetapi juga tampil sebagai aktor aktif dalam proses politik kontemporer. Mereka memainkan peran penting dalam mobilisasi massa, membangun jaringan dukungan berbasis kekerabatan dan komunitas adat, serta menjadi penghubung efektif antara masyarakat dengan pemerintah. Keterlibatan mereka dalam komunikasi politik memperlihatkan kemampuan untuk mengartikulasikan nilai-nilai lokal dalam bahasa yang diterima oleh masyarakat luas. Keberadaan mereka turut membentuk identitas kepemimpinan yang tidak hanya dilihat dari kompetensi administratif, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai luhur budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Aidil, D. S. R. (2024) ‘PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: Menilai

- Dampaknya terhadap Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat’, *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), pp. 1126–1137.
- Haboddin, M. (2016) *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Prianto, A. L. et al. (2025) ‘Prices Never Lie: Political Parties Contribution to High Cost of Election in Indonesia’, *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), pp. 1–29.
- Rismawidiawati, R. (2017) ‘Bertahannya Bangsawan Luwu (suatu Analisa Budaya Politik Orang Bugis)’, *Patanjala*, 8(3), pp. 413–428.
- Rohim, M. et al. (2023) ‘Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia’, *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), pp. 662–670.
- Ruruh Aris Setyawibawa, M. M. (2025) *Rivalitas Politik Dinasti*. umsu press.
- Sari, I. and Suswanta (2023) ‘Narrative Policy Framework: Indonesia’s Capital City Relocation Policy’, *Jurnal kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), pp. 80–92.
- Swandari, K. A. D. P., Lukman, J. P. and Wirantari, I. D. A. P. (2025) ‘Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bidang Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024’, *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(2).
- Wakhid, A. A., Qohar, A. and Faizal, L. (2021) ‘Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan’, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 13(2), pp. 35–47.
- Zarkasi, A. and Rizal, D. (2020) ‘Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota jambi periode tahun 2018-2023 di kecamatan telanaipura kota jambi’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(3), pp. 136–143.
- Zharfandy, I. (2016) ‘Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013’. FISIP UIN Jakarta.